



## *Internet Financial Reporting dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kota dan Kabupaten Di Indonesia*

Ariefia Nosihana dan Rizal Yaya

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Corresponding author: [r.yaya@umy.ac.id](mailto:r.yaya@umy.ac.id)<sup>a</sup>, [rizalyaya@gmail.com](mailto:rizalyaya@gmail.com)<sup>b</sup>

### INFORMASI ARTIKEL

#### Article history:

Received 20 September 2016

Received in revised form 1 October 2016

Accepted 5 October 2016

Available online 28 October 2016

#### Keywords:

*Internet Financial Reporting, Local Government, Political Competition, Asset Size*

### ABSTRACT

*This research identifies factors affecting the publication of financial reports in the internet or known as internet financial reporting (IFR) after the issuance of Home Minister Instruction No. 188.52/1797/SJ year 2012 on Improving Transparency of Local Budget Management. One hundred and seventy five cities and regencies were selected as samples based on purposive sampling and analysed by using multiple regression. The result shows that political competition and size of local government asset has positive influence on the IFR. This indicates that Heads of local government whose political party is not majority and Heads of local government with greater asset size, had used IFR as media to show their performance to the public. This is consistence with stewardships theory that asymmetric information between local government (stewards) with the public (principals) can be reduced through accountability and transparency of financial management whereby the pressure and ability to do it appeared significantly in local governments with high political competition and with relatively greater asset. In this research, some other potential factors such as leverage, own-source revenue, type of local government (city or regency) and audit opinion are not proven to influence the IFR practices in the local governments..*

©2016 FEB USK. All rights reserved.

### 1. Pendahuluan

Peningkatan transparansi dan ketersediaan informasi sektor publik di Indonesia makin berkembang setelah dikeluarkannya Undang – Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Secara eksplisit UU tersebut menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban dalam memberikan informasi publik secara lebih transparan, bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan masyarakat yang dapat diakses dengan cepat, efisien, mudah dijangkau masyarakat dan mudah dipahami. Kendati demikian menurut

laporan Corruption Perceptions Index 2015, peringkat Indonesia baru menempati urutan 88 dari 168 negara yang diukur, dengan skor sebesar 36 dari total 100 poin maksimum (Transparency International, 2016). Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih serius dalam meningkatkan kualitas transparansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah.

Dalam hal pelayanan dan penyampaian informasi kepada masyarakat, situs internet pemerintah di banyak negara telah menjadi instrumen layanan potensial yang inovatif dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan

informasi. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi online melalui internet secara umum telah berdampak besar pada aktivitas manusia. Berkomunikasi melalui internet telah memungkinkan masyarakat luas dapat mengakses suatu informasi kapanpun dan dimanapun. Hal ini merupakan sesuatu yang perlu diberi perhatian untuk pengembangannya oleh pemerintah Indonesia, terlebih pengguna internet Indonesia diperkirakan akan mencapai 112 juta orang di tahun 2017 atau naik ke peringkat 5 dunia dari peringkat 6 saat ini (Yusuf, 2014).

Kebijakan penerapan e – Government sudah tertuang dalam bentuk Intruksi Presiden No. 03 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, yang menginstruksikan agar tiap instansi pemerintah baik dari pusat hingga daerah membangun situs web nya masing-masing dalam upaya untuk memperkenalkan potensi daerah dan meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat hingga akhirnya mampu menjadi good governance. Internet juga dapat dimanfaatkan oleh kepala daerah dalam mengungkapkan pertanggungjawaban secara sukarela dan konkrit dalam mewujudkan akuntabilitasnya (Febrianty dan Jatmiko, 2011). Dengan demikian pola layanan informasi publik tradisional dengan layanan face to face dapat dikembangkan menjadi model baru melalui e- Government yang lebih efisien dan fleksibel karena pengaksesannya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat.

Publikasi laporan keuangan pemerintah melalui e-Government yang dikenal dengan internet financial reporting (IFR) merupakan salah satu bentuk bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Akan tetapi sejauh ini pengungkapan tersebut lebih bersifat secara sukarela (voluntary disclosure) karena tidak ada sanksi yang diterapkan jika tidak dipenuhi. Oleh karena ini, Trisnawati dan Achmad (2014) menemukan bahwa tidak semua Pemda mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap tiap tahunnya, sehingga menyebabkan perbedaan kualitas dan informasi keuangan antar Pemda.

Untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan melalui internet, di tahun 2012 Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Instruksi

Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tentang transparansi pengelolaan anggaran daerah. Instruksi tersebut mewajibkan agar Pemda mempublikasikan 12 dokumen pengelolaan anggaran daerah kepada masyarakat di dalam situs resminya. Akan tetapi, berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) pada September 2013 diungkapkan bahwa ternyata mayoritas Pemda masih enggan mempublikasikan pengelolaan anggaran pada situs resminya. Agustin (2014) telah melakukan penelitian serupa untuk membuktikan publikasi pengelolaan anggaran pada website Pemda di Sumatera Barat namun hasilnya masih banyak Pemda yang masih kurang dalam mewujudkan transparansi. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa terdapat banyak faktor yang memengaruhi pengungkapan IFR pada website pemerintah.

Penelitian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi praktek Internet Financial Reporting pada e-Government telah dilakukan antara lain oleh Hilmi & Martani (2012), Aditya, dkk., (2014), Rahman dkk. (2014) dan Trisnawati dan Achmad (2014) dengan kesimpulan penelitian yang tidak konsisten antar penelitian yang ada. Pada penelitian ini, untuk meningkatkan validitas internal penelitian, variabel dependen IFR diukur dengan indeks pengungkapan yang didasarkan pada Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ. Pendekatan yang berbeda dibandingkan penelitian sebelumnya yang menggunakan variabel dummy. Adapun untuk meningkatkan validitas eksternal sebanyak 175 Pemda diikutsertakan sebagai sampel penelitian dengan menggunakan data terbaru pemerintah yang tersedia di internet yaitu laporan tahun 2014..

## **2. Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis**

### **2.1 Landasan Teori**

Teori utama terkait tingkat pengungkapan dan good governance ialah teori agency dan teori stewardship (Van Slyke, 2006). Dalam hubungannya dengan sektor publik, teori yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah teori stewardship. Apabila dalam teori agency menjelaskan hubungan antara principal dan agent maka dalam teori stewardship dijelaskan

hubungan antara principal dan steward. Teori stewardship menggambarkan situasi dimana manajemen tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi (Donaldson dan Davis, 1991). Teori tersebut mengasumsikan adanya hubungan yang kuat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menggambarkan maksimalisasi utilitas kelompok principals dan manajemen. Maksimalisasi utilitas kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi tersebut.

Akuntansi organisasi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara stewards dengan principals. Dimana rakyat sebagai principal dan pemerintah sebagai stewards, adalah sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan kejujuran pada pihak lainnya. Pemerintah sebagai pihak yang lebih banyak memiliki informasi khususnya dalam bidang keuangan diharapkan dapat mewujudkan transparansi terhadap rakyat sesuai harapan dan kepercayaan yang telah diberikan rakyat.

Teori signalling menjelaskan bahwa pemerintah yang memiliki tanggung jawab dan amanah dalam membangun negara ini kearah yang lebih maju kedepan ingin memberikan signal yang baik kepada masyarakat. Realisasinya yaitu dengan cara menyajikan laporan keuangan yang akurat, penyampaian informasi kinerja pemerintah selama ini tanpa menutupi apapun, peningkatan pelayanan masyarakat dan pengemasan prestasi dan kinerja keuangan yang simple dan menarik dibaca oleh pengguna (Hilmi & Martani 2012). Pengungkapan informasi keuangan yang disajikan secara lengkap menunjukkan inisiatif bagi Pemda tersebut untuk lebih transparan dalam pengelolaan pemerintahannya yang akan berujung balasan signal yang baik dari masyarakat yang akan terus mendukung pemerintah untuk terus berkembang dan optimal dalam membangun negara.

Publikasi laporan keuangan melalui internet merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat yang

dianggap paling efisien, cepat dan murah. Walaupun sudah terdapat Undang-Undang yang mengatur mengenai transparansi mengenai segala informasi dari pemerintah kepada masyarakat salah satunya laporan keuangan, tidak semua Pemda mempublikasikan laporan keuangan secara lengkap di website yang telah tersedia.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 3, tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan keuangan merupakan bentuk nyata dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban pemerintah bagi masyarakat, sehingga data yang disajikan haruslah dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya tidak ada manipulasi anggaran yang dapat merugikan masyarakat. Menurut Ghazali dan Chariri (2007), pengungkapan merupakan pemberian data yang bermanfaat pada pihak yang memerlukan. Masyarakat yang selama ini sudah dibebankan dengan pembayaran pajak demi mendapatkan fasilitas yang layak dari pemerintah tentu juga ingin melihat apakah realisasi atau penggunaan dana tersebut sudah sesuai yang diharapkan.

Pada saat ini banyak terjadi perbedaan bentuk pengungkapan laporan keuangan, ada yang mengungkapkannya secara lengkap namun juga tidak sedikit yang hanya asal-asalan dalam mempublikasikannya padahal sudah jelas hal tersebut merupakan kewajiban para Pemda seperti yang telah tertuang pada undang-undang. Laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya hal ini tertuang pada PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ telah mengatur pedoman pelaporan anggaran Pemda yang transparan dan akuntabel, instruksi ini mewajibkan Pemda untuk memberikan informasi keuangannya melalui website masing-masing Pemda. Terdapat 12 dokumen keuangan yang disebutkan dalam instruksi tersebut antara lain: (1) Ringkasan RKA SKPD, (2) Ringkasan RKP PPKD, (3) Rancangan Perda APBD, (4) Rancangan Perda Perubahan APBD, (5) Perda

APBD, (6) Perda Perubahan APBD, (7) Ringkasan DPA SKPD, (8) Ringkasan DPA PPKD, (9) LRA SKPD, (10) LRA PPKD, (11) LKPD yang telah diaudit, dan (12) Opini BPK atas LKPD.

## 2.2 Pengembangan Hipotesis

### 2.2.1 Kompetisi Politik

Berdasarkan penelitian Carlos et.al., (2008) dijelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara kompetisi politik dengan pengungkapan laporan keuangan. Administrasi public di tingkat lokal sebagian besar diatur oleh politisi yang memiliki peran dan posisi strategis dalam mengontrol kebijakan keuangan daerah. Dalam hal ini, semakin tinggi tingkat kompetisi politik maka biasanya pejabat pemerintah yang sedang menjabat akan berusaha sebaik mungkin memperlihatkan kinerjanya yang terbaik salah satu contohnya yaitu melakukan pengungkapan laporan keuangan pada website pemerintahan, website tersebut dipilih dengan anggapan media yang paling mudah dan murah. Dengan demikian pejabat akan mendapat perhatian dan kepercayaan dari masyarakat yang telah memilih sebelumnya agar bisa terpilih kembali pada periode yang akan datang. Selain itu dengan adanya kompetisi politik maka akan muncul pengawasan dari pihak lain dan masyarakat dalam memantau para pejabat yang kadang lupa dengan janji-janji manisnya pada saat pemilu dulu. Hal ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu Hilmi dan Martani (2012), Rahman dkk. (2014) dan Trisnawati dan Achmad (2014) bahwa kompetisi politik berpengaruh terhadap pengungkapan secara sukarela. Berdasarkan uraian tersebut peneliti membuat hipotesis sebagai berikut:

H1: Kompetisi politik berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR melalui e-Government.

### 2.2.2 Ukuran Pemda

Semakin besar aset yang dimiliki suatu daerah menandakan semakin besar juga ukuran Pemda tersebut. Aset dapat mewakili seberapa besar pemerintahan, semakin besar aset maka semakin banyak modal yang ditanam. Maka dari itu ukuran Pemda yang besar mengindikasikan terdapat jumlah kekayaan yang besar pula,

pengawasan dari masyarakat akan kegiatan pemerintah akan semakin ketat pula karena terdapat kekhawatiran adanya penyelewengan dana yang mungkin saja terjadi. Pemerintah pasti akan berusaha sebisa mungkin mengurangi asimetri informasi keuangan terhadap masyarakat yang mulai beranggapan negative dengan mempublikasikan laporan keuangannya, karena telah adanya e-government tersebut maka akan dipilih karena penggunaannya yang mudah dan cepat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Alan dan Mack (2007), Carlos dkk., (2008), Hilmi dan Martani (2012) dan Medina (2012). Dari penjelasan diatas maka peneliti menarik sebuah hipotesis yaitu:

H2: Ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR melalui e-Government

### 2.2.3 Rasio Pembiayaan Utang (*Leverage*)

*Leverage* merupakan kemampuan pemerintah dalam menjamin dana yang dipinjamnya dalam memberikan pelayanan dan program-program bagi masyarakat baik untuk sekarang dan di masa yang akan datang. Disini muncullah hubungan antara pemerintah dengan kreditur, dimana leverage yang semakin tinggi akan menyebabkan pengawasan kreditur terhadap debitur semakin tinggi dalam penggunaan dana yang dipinjam dan seberapa tingkat kesanggupan dalam pengembaliannya kelak. *E-Government* menjadi media yang digunakan oleh debitur dalam memfasilitasi kreditur dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah (Medina 2012). Dari penjelasan tersebut dapat dirumuskan sebuah hipotesis yaitu:

H3: Rasio Pembiayaan Utang (*Leverage*) berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR melalui e-Government

### 2.2.4 Kekayaan Pemda

Kekayaan daerah mencerminkan bagaimana kinerja sebuah Pemda, sehingga jika suatu Pemda memiliki kekayaan yang tinggi akan berusaha untuk menunjukkannya terhadap para *stakeholders* sebagai bentuk signal dari manajemen public yang baik. (Christiaensens, 1999 dalam Puspita dan Martani 2010). Kekayaan daerah dapat dinyatakan dengan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan uang

melalui rekening kas umum daerah yang menambah equitas dana. PAD terdiri dari: (1) Pajak daerah, (2) Retribusi daerah, (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (4) Lain-lain PAD yang sah.

Kekayaan daerah yang kecil menunjukkan kinerja pemerintah yang buruk, sedangkan Pemda yang memiliki kinerja yang buruk akan menghindari pengungkapan sukarela dan akan lebih memilih untuk membatasi akses informasi kepada masyarakat. Pemda yang berkinerja baik akan mengungkapkan informasi lebih banyak dan menggunakan teknik pengungkapan yang lebih baik sesuai dengan teori signaling. Publikasi laporan keuangan pada *e-government* Pemda dapat menyampaikan hasil kerjanya dengan mudah dan murah, hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya oleh Rahman dkk (2014), Carlos dkk (2008) dan Trisnawati dan Achmad (2014). Dari penjabaran diatas dapat ditarik sebuah hipotesis yaitu:

H4: Kekayaan Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR melalui e-Government

### 2.2.5 Tipe Pemda

Tipe Pemda di Indonesia terdiri dari Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II, dimana Pemda tingkat I yaitu provinsi dan Pemda tingkat II yaitu kabupaten dan kota. Dalam penelitian ini menggunakan Pemda tingkat II, penelitian Laswad dkk (2005) mengungkapkan dimana tipe pemerintahan yang berbentuk kota yang penduduknya lebih besar dan beragam membuat situs pemerintahan daerahnya lebih canggih dan lebih banyak informasi yang diungkap pada situsnya, adanya akses internet yang lebih baik pada daerah kota menyebabkan tingkat pengungkapan pada daerah kota lebih tinggi daripada di kabupaten. Sehingga disini pemerintah di kota lebih mengoptimalkan hal tersebut terutama dalam pengungkapan laporan keuangan. Penelitian Medina (2012), Laswad dkk (2005), Trisnawati dan Achmad (2014), Rahman dkk (2014) menunjukkan bahwa tipe Pemda memiliki pengaruh terhadap pelaporan keuangan. Dari penjelasan diatas peneliti membuat hipotesis:

H5: Tipe Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR melalui e-Government

### 2.2.6 Opini Audit

Hasil kinerja pemerintah juga tertuang di dalam laporan keuangannya, setiap akhir periode akuntansi pemerintah diwajibkan menyerahkan laporan keuangan kepada auditor independen yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). BPK akan melakukan pemeriksaan pada laporan keuangan dengan tujuan mendapatkan opini audit. Dari opini audit inilah yang nantinya dijadikan alat pengukur kinerja dari suatu Pemda apakah kualitas akuntabilitas keuangannya baik atau tidak. Terdapat lima (5) opini audit dalam laporan keuangan yaitu: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Pemda yang mendapatkan hasil opini audit WTP biasanya akan lebih cenderung untuk mempublishkan laporan keuangannya agar masyarakat mengetahui bagaimana kinerja Pemda tersebut (Trisnawati dan Achmad, 2014). Dari gambaran diatas peneliti membuat sebuah hipotesis yaitu:

H6: Opini Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan IFR melalui *E-Government*.

## 3. Metodologi Penelitian

### 3.1 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi seluruh Pemda di Indonesia pada tahun 2014. Sampel penelitian ini adalah Pemda yang dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria: (1) bukan termasuk Pemda pemekaran (minimal 3 tahun terakhir); (2) mempunyai website resmi yang dapat diakses; (3) mempublishkan laporan keuangan tahun anggaran 2014.

### 3.2 Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. Data Publikasi laporan keuangan Pemda, kompetisi politik, ukuran Pemda, rasio pembiayaan (*Leverage*), *kekayaan Pemda, tipe Pemda dan opini audit* merupakan variabel independen yang akan diteliti. Sumber data laporan keuangan diperoleh dari masing-masing website resmi pemerintah yang tersedia. Data komposisi anggota DPRD berdasarkan partai politik diperoleh dari website Pemda dan website Komisi Pemilihan Umum (KPU). Data total aset Pemda, total kewajiban Pemda dan total

PAD bersumber dari LKPD yang diperoleh dari Pusat Informasi dan Komunikasi BPK RI. Data jumlah penduduk diperoleh dari website Kemendagri, yaitu [www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id). Data terkait opini audit atas LKPD diperoleh dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan oleh BPK yang dipublikasikan melalui [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id) dari Ikhtisar Pemeriksaan semester I tahun 2015. Data variabel dependen, yaitu *checklist* dipublikasikan atau tidaknya informasi keuangan sesuai ketentuan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012. dapat dilihat dari masing-masing *website* Pemda. Alamat situs resmi Pemda dapat diperoleh dari [www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id) atau dari [www.elocalgovernment.com](http://www.elocalgovernment.com).

### 3.3 Model Penelitian

Model regresi berganda digunakan untuk menguji apakah variabel kompetisi politik, ukuran Pemda, leverage, kekayaan Pemda, tipe Pemda, dan opini audit memengaruhi internet

financial reporting (IFR). Model regresi berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis sebagai berikut:

$$IFR = \alpha + \beta^1 POLCOM + \beta^2 LnSIZE + \beta^3 LnLEV + \beta^4 LnWEALTH + \beta^5 TYPE + \beta^6 AUDIT + e$$

Ket.

*IFR* : checklist variabel internet financial reporting

$\alpha, \beta^{1,2,3,4,5,6}$  : Konstanta

*POLCOM* : variabel kompetisi politik

*SIZE* : variabel ukuran Pemda

*LEV* : variabel leverage

*WEALTH* : variabel kekayaan Pemda

*TYPE* : variabel tipe Pemda

*AUDIT* : variabel opini audit

*e* : kesalahan pengganggu

### 3.4 Pengukuran Variabel

Pengukuran pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1

Tabel 1  
Pengukuran Variabel

No	Variabel	Rumus Regresi	Perhitungan
1.	IFR pada e-Government	SPIFR	<u>Pengungkapan dalam website</u>
2.	Kompetisi Politik	POLCOM	<u>Pengungkapan dalam Instruksi Mendagri</u> <u>Jumlah anggota dewan partai non pendukung kepala daerah</u> <u>Jumlah total anggota dewan</u>
3.	Ukuran Pemda	SIZE	Ln Total Aset
4.	Rasio Pembiayaan Utang ( <i>Leverage</i> )	LEV	<u>Total Kewajiban</u>
5.	Kekayaan Pemda	WEALTH	<u>Total Aset</u> <u>Total PAD</u>
6.	Tipe Pemda	TYPE	<u>Jumlah Penduduk</u>
7.	Opini Audit	AUDIT	Angka 1 untuk pemerintah Kota dan angka 0 untuk pemerintah Kabupaten Angka 1 untuk Pemda yang mendapat opini audit WTP dan angka 0 untuk Pemda yang mendapat opini audit non WTP

### 3.5 Operasionalisasi Variabel

#### 3.5.1 Variabel Dependen

Variabel dependen yang akan diteliti yaitu internet financial reporting atau tersedianya informasi keuangan daerah di dalam situs pemerintah. Komponen yang akan diteliti yaitu dihitung berdasarkan ketersediaan informasi keuangan sesuai yang tertuang di dalam ketentuan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ Tahun 2012 pada situs resmi setiap Pemda di Indonesia

dan hasil maksimal 12 poin untuk setiap daerah. Berikut komponen yang di hitung untuk melihat internet financial reporting:

- 1) Ringkasan RKA SKPD
- 2) Ringkasan RKP PPKD
- 3) Rancangan Perda APBD
- 4) Rancangan Perda Perubahan APBD
- 5) Perda APBD
- 6) Perda Perubahan APBD
- 7) Ringkasan DPA SKPD

- 8) Ringkasan DPA PPKD
- 9) LRA SKPD
- 10) LRA PPKD
- 11) LKPD yang telah diaudit
- 12) Opini BPK ata

### 3.5.2 Variabel Independen

- 1) Kompetisi Politik (POLCOM)  
 Kompetisi politik merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur seberapa besar peran politik akan memengaruhi administrasi pada pemerintah dan sebagai proksi tersedianya informasi keuangan mengingat pertanggungjawaban mereka. Pada proksi ini dapat diukur dengan Jumlah anggota dewan partai non pendukung kepala daerah dibagi dengan jumlah total anggota dewan.
- 2) Ukuran Pemda (*SIZE*)  
 Aset daerah dapat digunakan dalam mengukur besar kecilnya ukuran Pemda. Laswad et.al., (2005) menghubungkan kinerja terhadap Internet Financial Reporting (IFR) dengan ukuran Pemda. Dari penelitian tersebut, dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara ukuran Pemda yang digambarkan dengan seberapa besar aset Pemda, dengan Internet Financial Reporting (IFR). Pada penelitian ini ukuran Pemda dapat diukur dengan besarnya total aset Pemda.
- 3) Rasio Pembiayaan Utang (*LEV*)  
 Leverage merupakan variabel yang digunakan untuk mengukur kemampuan Pemda dalam menjamin dana yang dipinjam menggunakan jumlah aset yang dimiliki oleh Pemda (Sinaga dan Prabowo, 2011). Dimana rasio pembiayaan hutang diukur dengan menghitung total kewajiban dengan total ekuitas dana Pemda.
- 4) Kekayaan Pemda (*WEALTH*)  
 Kekayaan Pemda didefinisikan pada seberapa besar pendapatan asli daerah tersebut. PAD merupakan sumber keuangan yang berasal dari Pemda itu sendiri dan merupakan potensi pendapatan daerah tersebut. Lestiani (2008) juga menggunakan rasio PAD sebagai indikator ukuran kekayaan daerah, menunjukkan kinerja Pemda yang semakin

baik. Kekayaan daerah dapat diukur dengan persamaan total PAD dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut.

- 5) Tipe Pemda (*TYPE*)  
 Tipe Pemda pada penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu pemerintah kabupaten dan kota. Didefinisikan bahwa pada pemerintah di kota yang ukuran (luas wilayah) relative lebih kecil dan kepadatannya lebih besar akan memiliki jaringan yang lebih bagus dibandingkan dengan daerah kabupaten, sehingga semakin baik jaringan pemerintah yang dimiliki akan dianggap lebih memberikan pengungkapan laporan keuangan. Penelitian Trisnawati & Achmad (2014) menggunakan variabel dummy sebagai ukuran dari tipe Pemda.
- 6) Opini Audit (AUDIT)  
 Trisnawati & Achmad (2014) menggunakan variabel opini audit sebagai faktor yang memengaruhi adanya internet financial reporting pada situs pemerintah. Hasil opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dari laporan keuangan yang disetorkan oleh seluruh Pemda menjadi salah satu tolok ukur kinerja pemerintah. Dengan anggapan bahwa jika Pemda tersebut mendapatkan opini WTP maka akan semakin tinggi indikasinya dalam melakukan pengungkapan informasi keuangan dengan begitu akan memperlihatkan akan kinerja baiknya. Variabel dummy digunakan dalam mengukur opini audit tersebut dengan 1 untuk Pemda yang mendapatkan opini audit WTP dan 0 untuk Pemda yang mendapatkan opini audit selain WTP.

### 3.6 Pengujian Hipotesis

#### Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar varian dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variabel independen. Nilai koefisien determinasi berkisar antara 0 hingga 1, jika koefisien semakin mendekati 1 menandakan model penelitian semakin baik.

### Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen

- Jika P value < alpha (0,05), maka variabel independen berpengaruh terhadap variabel independen, maka hipotesis diterima.
- Jika P value > alpha (0,05), maka variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel independen, maka hipotesis ditolak.

### Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan kedalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

## 4 Hasil dan Pembahasan

### 4.3 Deskripsi Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan sampel 175 Pemerintah Kabupaten/Kota di Indonesia pada tahun 2014. Ringkasan perhitungan sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 1. Dari 175

Pemda hanya sebanyak 5 Pemda yaitu Kab. Seruyan, Kab. Barito Timur, Kab. Majene, Kab. Simeulue dan Kab. Pariaman atau 2,85% yang menyediakan keseluruhan komponen dari informasi keuangan daerah sesuai dengan Instruksi Mendagri nomor 188.52/1797/SJ tahun 2012 pada situs resminya. Sedangkan 97,15% situs-situs Pemda lainnya belum mempublikasikan seluruh informasi keuangannya, namun dapat dikatakan sudah mulai mengembangkan situsnya dengan baik dan menjadikan internet sebagai media yang berguna dalam peningkatan transparansi informasi keuangan terhadap masyarakat. Jumlah presentase pengungkapan informasi keuangan tiap Pemda terdapat pada tabel 2.

Statistik deskriptif menguraikan gambaran mengenai variabel-variabel penelitian, yang meliputi minimum, maximum, mean dan deviasi standar. Statistik deskriptif untuk variabel POLCOM, SIZE, LEVERAGE, WEALTH, TYPE, AUDIT secara keseluruhan dapat dilihat pada Tabel 2. Pada tabel dibawah ini menyajikan statistic deskriptif variabel independen dari 175 Pemda yang diteliti.

**Tabel 2**  
**Uji Statistik Deskriptif**

	Minimum	Maximum	Mean	Std Deviation
POLCOM	.067	1.000	.64305	.1743
SIZE	23.48	33.27	287193	.9326
LEVERAGE	.0000002	214.1767675	1.232691824	16.1896
WEALTH	34135.39	43417085.28	8611459891	3442134.06596
TYPE	0	1	.26	.438
Audit	0	1	.52	.501

Catatan: N = 175

- 1) Variabel independen kompetisi politik (POLCOM) memiliki nilai minimum sebesar 0,067 yaitu pada daerah Kab. Soping, nilai maksimum sebesar 1,000 dimiliki oleh beberapa Pemda yaitu Kab Seruyan, Kab. Barito Timur, Kab. Majene, Kab. Simeulue dan Kota Pariaman. Nilai rata-rata sebesar 0,64305 dan standar deviasi sebesar 0,1743
- 2) Variabel independen ukuran Pemda (SIZE) merupakan hasil dari Natural Logaritma total aset masing-masing Pemda. Dari hasil olah data diketahui bahwa nilai minimum sebesar 23,48 pada Kota Cirebon, nilai maksimum

sebesar 32,27 pada Kab Muaro Jambi, dan rata-rata sebesar 28,7193. Kemudian standar deviasi variabel ukuran Pemda yaitu 0,93262.

- 3) Variabel rasio pembiayaan utang (LEVERAGE) mempunyai nilai minimum sebesar 0,0000002 dimiliki oleh Kota Ternate dan nilai maksimum sebesar 214,1767675 pada Kota Cirebon. Nilai rata-rata dari pembiayaan hutang sebesar 16,00768056. Standar deviasi yang dimiliki yaitu 16,1896.
- 4) Variabel independen kekayaan Pemda (WEALTH) mempunyai nilai minimum sebesar Rp 34.135,39/jiwa oleh Kota Cirebon,

nilai maksimum sebesar Rp 43.417.085/jiwa pada Kab Muaro Jambi, dan rata-rata sebesar Rp 861.145,9891//jiwa. Sedangkan standar deviasinya yaitu Rp 3.442.134,06596/jiwa.

- 5) Variabel independen tipe Pemda (TYPE) merupakan variabel dummy sehingga memiliki nilai minimum 0 dan maksimum 1, dari keseluruhan sampel yang diteliti terdiri dari 45 (25,71%) pemerintah kota dan 130 (74,28%) pemerintah kabupaten. Dengan nilai rata-ratanya yaitu 0,26 dan standar deviasinya 0,438.
- 6) Variabel independen opini audit (AUDIT) juga menggunakan variabel dummy sehingga memiliki nilai minimum dan maksimum yang sama dengan variabel tipe Pemda yaitu 0 dan 1. Nilai rata-rata variabel opini audit yaitu 0,52, standar deviasi yang didapat sebesar 0,501. Dari jumlah tersebut, sebanyak 91 (52%) Pemda mendapatkan opini audit WTP dan sebanyak 85 (48%) Pemda mendapatkan opini audit Non WTP pada laporan keuangannya.

#### 4.4 Uji Asumsi Klasik

##### 4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Model regresi yang baik adalah model regresi yang berdistribusi normal. Berdasarkan uji *Kolmogorov-Smirnov* dihasilkan bahwa nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,407 yang jauh lebih besar di atas  $\alpha$  0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa residual menyebar normal.

##### 4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas adalah pengujian untuk menentukan apakah pada model regresi ditemukan adanya masalah di antara variabel independen. Batas dari *tolerance value* adalah 0,10 dan batas *VIF* adalah 10. Jika hasil analisis menunjukkan hasil *tolerance value* di atas 0,10 dan *VIF* di bawah nilai 10, maka tidak terjadi multikolinieritas. Berikut ini hasil uji multikolinieritas atas variabel kompetisi politik,

ukuran Pemda, kekayaan Pemda, rasio pembiayaan utang, tipe Pemda dan opini audit terhadap *internet financial reporting*. Berdasarkan uji multikolinieritas didapat hasil *tolerance* berada diantara 0,10 dan 10 sehingga tidak ada gejala multikolinieritas antar variabel independen pada model

##### 4.4.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi kesalahan pengganggu ( $e$ ) mempunyai varians yang sama atau tidak dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Hasil uji heteroskedastisitas pada model yang di uji diketahui semua titik-titik menyebar ke semua sisi dan tidak membentuk pola tertentu, sehingga dapat disimpulkan bahwa asumsi non-heteroskedastisitas terpenuhi.

##### 4.4.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada suatu pengamatan model regresi. Hasil uji autokorelasi diketahui nilai *Durbin Watson* sebesar 2,151. Sedangkan nilai tabel pembanding berdasarkan data yaitu nilai  $d_{L,\alpha} = 1,6824$  sedangkan nilai  $d_{u,\alpha} = 1,8240$ . Nilai  $d_{u,\alpha} < dw < 4 - d_{u,\alpha}$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak mengandung autokorelasi.

#### 4.5 Pengujian Hipotesis

##### 4.5.1 Uji Koefisien Determinasi (Adjusted R Square)

Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R Square*) digunakan untuk melihat seberapa besar variasi dari nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variasi nilai variabel-variabel independennya.

**Tabel 3**  
**Hasil Pengujian Hipotesis**

	Coefficients	Std Error	t	Sig	VIF
(Constant	-191.373	57.713	-3.316	.001	
POLCOM	61.348	9.493	6.463	.000	1.078
SIZE	6.380	1.953	3.267	.001	1.305
LEVERAGE	0.209	.111	1.886	.061	1.267
WEALTH	2.96E-007	.000	-.630	.529	1.025
TYPE.700	-1.437	3.728	-.385	.700	1.051
AUDIT	-1.250	3.275	-.382	.703	1.060

Dependen Variabel IFR  
R= .650; R Square=.423; Adjusted R Square .398  
F=17.465; Sig=0.000

Merujuk pada tabel 3 nilai koefisien adjusted R Square pada model regresi adalah sebesar 0,398. Nilai Adjusted-R2 ini menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan 39,8% dari variabel dependennya, hal ini dikarenakan masih ada faktor-faktor lain yang memengaruhi internet financial reporting yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian ini.

#### 4.5.2 Uji Signifikan Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji apakah secara serentak variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Hasil uji F. Pengujiannya dapat dilakukan dengan cara membandingkan  $F_{tabel}$  dan  $F_{hitung}$ . Hipotesis diterima jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai sig  $< \alpha$  0,05. Nilai  $F_{tabel}$  pada  $\alpha$  0,05 adalah 2,15. Nilai  $F_{hitung}$  adalah 17,465 sedangkan nilai sig adalah 0,000. Dengan demikian  $F_{hitung} > F_{tabel}$  dan nilai sig  $< \alpha$  0,05 yaitu 17,465  $>$  2,15 dan sig 0,000  $<$  0,05. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen. Ini juga membuktikan bahwa model ini dapat digunakan untuk uji t statistic yang menguji variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen.

#### 4.5.3 Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Hasil uji signifikansi parsial dapat dilihat pada tabel 3 diatas. Pengujian hipotesis dilakukan

dengan membandingkan (a)  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  atau (b) nilai sig dengan  $\alpha$  yang diajukan yaitu 95% atau  $\alpha = 0,05$ . Hipotesis diterima jika nilai sig  $<$   $\alpha$  0,05.

Pada variabel Kompetisi Politik (POLCOM) nilai  $t_{hitung}$  adalah 6,463 dan nilai sig adalah 0,000. Hal ini dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 6,463  $>$  1,97419 atau nilai signifikansi 0,000  $<$  0,05. Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel POLCOM bernilai positif yaitu 61,348, dengan demikian H1 diterima atau dengan kata lain Kompetisi Politik (POLCOM) berpengaruh signifikan positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *E-government*.

Pada variabel Ukuran Pemda (SIZE) nilai  $t_{hitung}$  adalah 3,267 dan nilai sig adalah 0,001. Hal ini dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 3,267  $>$  1,97419 atau nilai signifikansi 0,001  $<$  0,05. Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel SIZE bernilai positif yaitu 6,380, oleh karena itu H2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan Ukuran Pemda (SIZE) berpengaruh signifikan positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *E-government*.

Pada variabel Rasio Pembiayaan Utang (*Leverage*) nilai  $t_{hitung}$  adalah 1,886 dan nilai sig adalah 0,061. Hal ini dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu 1,886  $<$  1,97419 atau nilai signifikansi 0,061  $>$  0,05. Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel SIZE bernilai positif yaitu 0,209, sehingga H3 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Rasio Pembiayaan Utang (*Leverage*) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *E-government*.

Pada variabel Kekayaan Pemda (*WEALTH*) nilai  $t_{hitung}$  adalah -0,630 dan nilai sig adalah 0,529. Hal ini dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,630 < 1,97419$  atau nilai signifikansi  $0,529 > 0,05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel *SIZE* bernilai negative yaitu  $-2,96E-007$ ., sehingga  $H_4$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Kekayaan Pemda (*WEALTH*) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *E-government*.

Pada variabel Tipe Pemda (*TIPE*) nilai  $t_{hitung}$  adalah -0,385 dan nilai sig adalah 0,700. Hal ini dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,385 < 1,97419$  atau nilai signifikansi  $0,700 > 0,05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel *SIZE* bernilai negative yaitu -1,437, sehingga  $H_5$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Tipe Pemda (*TIPE*) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *E-government*.

Pada variabel Opini Audit (*AUDIT*) nilai  $t_{hitung}$  adalah -0,382 dan nilai sig adalah 0,703. Hal ini dapat dilihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,382 < 1,97419$  atau nilai signifikansi  $0,703 > 0,05$ . Nilai koefisien  $\beta$  dari variabel *SIZE* bernilai negative yaitu -1,250, sehingga  $H_6$  ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa Opini Audit (*AUDIT*) tidak berpengaruh signifikan positif terhadap *Internet Financial Reporting* melalui *E-government*.

#### 4.5.4 Koefisien Regresi

Koefisien regresi berganda dilakukan dengan membandingkan  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  dengan nilai sig dan  $\alpha$  yang diajukan yaitu 95% atau  $\alpha = 0,05$ . Secara rinci hasil pengujian regresi berganda dapat dilihat:

$$IFR = -191,373 + 61,348POLCOM + 6,380 \\ LnSIZE + 0,209 LnLEV - 2,96E- \\ 007LnWEALTH - 1,437TYPE - 1,250 \\ AUDIT + e$$

Berdasarkan persamaan diatas tersebut dapat dilihat hubungan masing-masing variabel sebagai berikut:

1) Nilai konstanta sebesar -191,373 menunjukkan apabila kompetisi politik, ukuran Pemda, rasio pembiayaan utang, kekayaan Pemda, tipe Pemda da opini audit terhadap *internet financial reporting* konstan atau tetap maka nilai

- 2) Nilai koefisien regresi untuk variabel kompetisi politik adalah positif sebesar 61,348 persen yang berarti setiap peningkatan kompetisi politik sebesar 1 persen akan diikuti dengan peningkatan pengungkapan laporan keuangan pada situs Pemda 61,348.
- 3) Nilai koefisien regresi untuk variabel ukuran Pemda adalah positif sebesar 6,380 persen yang berarti setiap peningkatan ukuran Pemda sebesar 1 persen akan diikuti dengan peningkatan pengungkapan laporan keuangan pada situs Pemda 6,380.
- 4) Nilai koefisien regresi untuk variabel rasio pembiayaan utang adalah positif sebesar 0,209 persen yang berarti setiap peningkatan rasio pembiayaan utang sebesar 1 persen akan diikuti dengan peningkatan pengungkapan laporan keuangan pada situs Pemda 0,209.
- 5) Nilai koefisien regresi untuk variabel kekayaan Pemda adalah negative sebesar  $2,96E-007$  persen yang berarti setiap peningkatan kompetisi politik sebesar 1 persen akan diikuti dengan penurunan pengungkapan laporan keuangan pada situs Pemda  $2,96E-007$ .
- 6) Nilai koefisien regresi untuk variabel tipe Pemda adalah negative sebesar 21,437 persen yang berarti setiap peningkatan tipe Pemda sebesar 1 persen akan diikuti dengan penurunan pengungkapan laporan keuangan pada situs Pemda 21,437.
- 7) Nilai koefisien regresi untuk variabel opini audit adalah negative sebesar 1,250 persen yang berarti setiap peningkatan opini audit sebesar 1 persen akan diikuti dengan penurunan pengungkapan laporan keuangan pada situs Pemda 1,250.

## 4.6 Pembahasan

### 4.6.1 Kompetisi Politik

Hasil pengujian pada variabel kompetisi politik menunjukkan bahwa kompetisi politik yang tinggi berpengaruh dalam mendorong Pemda lebih transparan dalam memberikan laporan keuangannya melalui website yang dimiliki. Pejabat yang sedang menjabat akan berusaha memperlihatkan kinerja terbaiknya sehingga dapat mendapatkan perhatian dari

masyarakat agar dapat memilihnya kembali pada periode yang akan datang.

Selain itu adanya kompetisi politik maka akan meningkatkan pengawasan kinerja pejabat dari pihak lainnya, maka dari itu salah satu upaya pemerintah dalam memperlihatkan kinerjanya dengan memperlihatkan laporan keuangan kepada masyarakat agar lebih transparan dan salah satu media yang dianggap paling efisien adalah internet. Melalui publikasi informasi keuangan sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ di internet, Pemda dapat mengurangi biaya yang dikeluarkan untuk memfasilitasi pengawasan oleh para saingan politik dan masyarakat. Hasil ini sesuai dengan penelitian Trisnawati dan Achmad (2014), Rahman dkk. (2014), Puspita dan Martani (2010), Hilmi dan Martani (2012) dan Rahman dkk. (2011).

#### 4.6.2 Ukuran Pemda

Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu variabel ukuran Pemda, jumlah aset yang dimiliki oleh Pemda dapat juga digunakan dalam mengukur seberapa besar pemerintahan. Maka dari itu ukuran Pemda yang besar mengindikasikan terdapat jumlah kekayaan yang besar pula, pengawasan dari masyarakat akan kegiatan pemerintah akan semakin ketat pula karena terdapat kekhawatiran adanya penyelewengan dana yang dilakukan pemerintah.

Adanya pengawasan yang besar maka pemerintah akan cenderung mempublikasikan laporan keuangan melalui internet sesuai dengan dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ. Ukuran Pemda yang besar memiliki pengelolaan keuangan yang lebih kompleks, sehingga semakin banyak asimetri informasi keuangan yang harus dilaporkan kepada masyarakat guna mengurangi asimetri informasi. Maka pemerintah diharapkan dapat mengadopsi metode pelaporan informasi keuangan yang mudah, murah, cepat dan efektif yaitu dengan memanfaatkan internet. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Laswad et.al., (2005), Sudarsana (2013), Hilmi (2010), Alan dan Mack (2007), Carlos, Tomas dan Tarragona (2008) dan Trisnawati dan Achmad (2014).

#### 4.6.3 Rasio Pembiayaan Utang (Leverage)

Berbeda hasil dengan pengujian hipotesis pertama dan kedua, hasil pengujian hipotesis ketiga yaitu rasio pembiayaan utang mengindikasikan bahwa *internet financial reporting* melalui *e-government* tidak dipengaruhi oleh rasio pembiayaan utang. Hal ini bertentangan dengan penelitian Trisnawati dan Achmad (2014), Laswad (2005), Rahman dkk. (2013) namun hasil ini sejalan dengan hasil penelitian Yurisca (2010). Jadi Pemda yang memiliki tingkat rasio pembiayaan utang yang rendahlah yang lebih cenderung melakukan *internet financial reporting* melalui *e-government* sesuai dengan dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ secara sukarela. Pemda yang memiliki tingkat rasio pembiayaan utang yang tinggi akan cenderung untuk tidak mempublikasikan informasi keuangannya guna mengurangi sorotan dari kreditur. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memberikan keterbukaan kepada kreditur.

#### 4.6.4 Kekayaan Pemda

Hipotesis keempat yaitu kekayaan Pemda tidak mempunyai pengaruh terhadap terciptanya *internet financial reporting* melalui *e-government* sesuai dengan dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ hal ini sejalan dengan penelitian Medina (2012) dan Yurisca (2010) namun bertentangan dengan hasil penelitian Hilmi dan Martani (2012), Carlos, Tomas dan Tarragona (2008), Trisnawati dan Achmad 2014. Kekayaan daerah dapat dinyatakan dengan jumlah pendapatan asli daerah (PAD). Jumlah pendapatan perkapita yang tinggi tidak secara otomatis memberikan pengaruh pada ketersediaan informasi keuangan. Besarnya kekayaan Pemda tidak secara langsung memberikan dampak bahwa masyarakatnya juga membutuhkan informasi keuangan yang di publikasikan Pemda pada *e-government* nya.

#### 4.6.5 Tipe Pemda

Hipotesis kelima menguji pengaruh tipe Pemda terhadap *internet financial reporting* melalui *e-government* sesuai dengan dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Trisnawati dan Achmad (2014) dimana tipe Pemda dalam mempublikasikan informasi keuangannya tidak dipengaruhi oleh tipe Pemda tersebut. Semakin majunya teknologi dan komunikasi di Indonesia membuat segala penjuru daerah hingga ke pedesaan kini juga dapat menjangkau internet sama dengan masyarakat pada daerah kota. Sehingga internet kini juga menjadi media yang efektif bagi pemerintah kabupaten dalam mempublikasikan informasi keuangannya. Berbagai UU dan Instruksi Pemerintah dalam mengatur apa saja yang harus diungkapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota juga sama sehingga tidak ada perbedaan dalam melakukan transparansi informasi keuangan pada *e-government*.

#### 4.6.6 Opini Audit

Hipotesis keenam juga gagal membuktikan pengaruh opini audit terhadap *internet financial reporting* melalui *e-government* sesuai dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ. Pada kenyataannya opini audit WTP yang diperoleh Pemda tidak mendorong dalam melakukan publikasi laporan keuangan, selain itu opini selain WTP juga tidak selalu mengindikasikan bahwa kinerja dan akuntabilitas Pemda tersebut buruk karena kinerja pemerintah tidak hanya diukur dari hasil laporan keuangan saja. Contohnya saja terdapat beberapa kasus yang terjadi akibat adanya suap-menyuap kepada aparat BPK demi mendapatkan opini WTP, dari kasus tersebut dapat menunjukkan kepada masyarakat bahwa opini WTP tidak menjamin kinerja Pemda yang baik atau terbebas dari tindak korupsi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Trisnawati dan Achmad (2014)

### 5 Kesimpulan, implikasi, Keterbatasan dan Saran

#### 5.3 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris tentang seberapa besar faktor – faktor seperti kompetisi politik, ukuran Pemda, leverage, kekayaan Pemda, tipe Pemda dan opini audit dapat memengaruhi *internet financial reporting* pada website tiap Pemda di Indonesia sesuai dengan dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ. Penelitian ini dilakukan terhadap

175 sampel, yang terdiri atas 45 pemerintah kota dan 130 pemerintah kabupaten di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, kompetisi politik berpengaruh terhadap publikasi laporan keuangan melalui internet karena semakin tinggi kompetisi politik akan mendorong Pemda memenuhi kebutuhan pengawasan para pesaing politik dan masyarakat akan janji-janjinya ketika pemilu. Ukuran Pemda juga berpengaruh positif signifikan terhadap publikasi laporan keuangan, semakin besar aset yang dimiliki daerah mengindikasikan ukuran Pemda yang semakin besar, maka akan terjadi pengawasan dari masyarakat karena kecurigaan terjadi penyelewengan dana.

Penelitian ini tidak menemukan bukti bahwa rasio pembiayaan utang (leverage), kekayaan Pemda, tipe Pemda dan opini audit mempunyai pengaruh signifikan terhadap *internet financial reporting* melalui *e-government* sesuai dengan dengan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ

#### 5.4 Implikasi Penelitian

Implikasi teoritis dan praktis dari penelitian ini adalah:

- 1) Implikasi Teoritis: Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetisi politik dan ukuran Pemda berpengaruh positif terhadap pengungkapan *internet financial reporting* melalui *e-government* hal ini sejalan dengan teori *stewardship* dan teori *signaling* bahwa pemerintah akan berusaha dalam memperlihatkan kinerjanya agar mendapat pandangan, kepercayaan serta dukungan dari masyarakat dalam membantu pemerintah menjalankan tanggungjawabnya memberikan pelayanan terhadap masyarakat.
- 2) Implikasi Manajerial: Untuk memotivasi Pemda agar mulai membangun dan mengembangkan *e-government* karena media tersebut sangat membantu komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat menjadi lebih dekat dan mudah, selain itu masyarakat juga dapat menilai bahwa pemerintah lebih transparan dan akuntabel.

#### 5.5 Keterbatasan dan Saran Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut:

- 1) Penggunaan kata kunci yang digunakan dalam me-locate situs Pemda yang dilakukan penulis bisa saja terdapat kesalahan.
- 2) Checklist hanya menggunakan Instruksi Mendagri Nomor 188.52/1797/SJ.
- 3) Hanya meneliti ketersediaan informasi keuangan pada situs pemerintah kabupaten dan kota saja.
- 4) Masih rendahnya kemampuan variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dalam memengaruhi variabel dependen yang diuji.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan pada penelitian diatas, peneliti menyarankan hal – hal sebagai berikut:

- 1) Menggunakan kata kunci yang lebih spesifikasi dalam mencari alamat situs Pemda.
- 2) Menambahkan checklist terpada item- item pelaporan informasi keuangan seperti PSAP atau bisa menambahkan checklist mengenai aksesibilitas website Pemda.
- 3) Menggunakan sampel penelitian pemerintah provinsi sebagai bahan penelitian selanjutnya atas transparansi laporan keuangan.
- 4) Menambahkan variabel lain yang diduga berpengaruh terhadap internet financial reporting , seperti jumlah SKPD, tingkat ketergantungan, IPM, kualitas informasi keuangan yang ditampilkan pada situs, kemandirian pemerintah daerah dan kompleksitas Pemda.

#### Daftar Pustaka

Agustin, Henri. 2014. Publikasi Dokumen Pengelolaan Anggaran Pada Website Pemkab/Pemkot di Propinsi Sumatera Barat. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI). Yogyakarta

Alan, K.S., dan Mack,T,. 2007. The Accessibility of Financial Reporting of U.S Municipalaties on te Internet. *Journal of Public Bidgeting, Accounting & Financial Management*, Volume 19, Number 1.

Carlos, S., Rueda, M., dan Portillo, P,. 2008. Factors Influencing E-Disclosure in Local Public Administrations.

Donaldson, L and Davis, J.H. 1991. Stewardship Theory or Agency Theory:CEO Governance

and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, 16 (1): 49-64

Febrianty S.Y., dan Jatmiko W.T. 2011. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela Oleh Pemda.Jurnal Universitas Diponegoro. <http://eprints.undip.ac.id/>.

Ghozali, I. dan Chariri, A. 2007. Teori Akuntansi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hilmi, A.K., dan Martani, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi.Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.

Laswad, F., Fisher. R., dan Oyelere. P. 2005. Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*, 24

Liestiani, A. (2008). Pengungkapan LKPD Kab/Kota di Indonesia untuk Tahun Anggaran 2006. Penelitian FEUI. 2008

Medina,F. 2012. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemda. Penelitian FEUNDIP 2012.

Puspita, R dan Martani,D,. 2010. Analisis Pengaruh Kinerja dan Karakteristik Pemda terhadap Tingkat Pengungkapan dan Kualitas Informasi dalam Website Pemda.Jurnal dan Prosiding Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin.

Rahman, Sutaryo dan Budiarmanto. 2014. Determinan Internet Financial Local Governmen Reporting di Indonesia. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.

Republik Indonesia. 2008. Undang-Undang No. 14. Keterbukaan Informasi Publik. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No. 24. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No.56. Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Republik Indonesia.2003. Instruksi Presiden No. 03. Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.

Republik Indonesia. 2012. Instruksi Mendagri No. 188/1797/SJ. Transparansi Pengelolaan Anggaran Daerah.

- Sinaga, Yurisca F dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo. 2011. Analisis Faktor-faktor yang Memengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemda. *Jurnal Universitas Diponegoro*.  
<http://eprints.undip.ac.id/>. (Diakses tanggal 7 November 2013).
- Transparency International, 2016. Corruption Perceptions Index 2015: Corruption still rife but 2015 saw pockets of hope. (diakses tanggal 20 April 2016)  
[http://files.transparency.org/content/download/1952/12820/file/2015\\_CPI\\_ReportInfographicsZIP.zip](http://files.transparency.org/content/download/1952/12820/file/2015_CPI_ReportInfographicsZIP.zip)
- Trisnawati, M.D., & Achmad, K,. 2014. Determinan Publikasi Laporan Keuangan Pemda melalui Internet. Simposium Nasional Akuntansi XVII. Mataram. Lombok.
- Van Slyke, D. M. 2006. Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 17:157–187.
- Yusuf, O. 2014. Pengguna Internet Indonesia Nomor Enam Dunia. (diakses tanggal 20 April 2016).  
<http://tekno.kompas.com/read/2014/11/24/07430087/Pengguna.Internet.Indonesia.Nomor.Enam.Dunia>.

